

**PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

Lakharis Inuzula¹, Koko Bustami²
email: lakharis@uniki.ac.id

^{1,2)} Dosen Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Abstract : *This study aims to see the effect of the understanding of government accounting standards and the use of regional financial management information systems on the quality of regional financial reports in Bireuen district. The sampling technique used in this study was purposive sampling. The data is based on questionnaires distributed to 31 SKPD in Bireuen Regency with a total sample of 62 samples. The analysis technique used is Multiple Linear Regression, hypothesis testing using statistics, F test and determination coefficient test and statistics for partial impact testing with a significance level of 5%. In addition, a descriptive test was also conducted regarding the development of Bireuen Regency. The results of data analysis indicate that the resulting multiple regression model is $Y = 0.799 + 0.191 (X1) + 0.355 (X2) + e$. The variable of understanding government accounting standards has a significant positive effect on the quality of regional financial reports. This is in accordance with the regression coefficient of the variable Government Accounting Standards Understanding (X1). The Variable of Regional Financial Management Information System Utilization (X2) has a positive and significant effect on the quality of regional financial reports, with a regression coefficient of 0.355. The simultaneous test results show that the understanding of government accounting standards and the use of regional financial management information systems affects the quality of regional financial reports with a determination coefficient of 85%.*

Keywords: *government accounting standards, regional financial management information systems, regional financial reports.*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan kegiatan akhir dari segala proses akuntansi yang dilakukan. Namun sama halnya dengan sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan sektor publik berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta, dikarenakan pemerintah sebagai lembaga yang berorientasi non-profit membuat akun yang terdapat pada laporan keuangan pun berbeda, seperti adanya Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan acuan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman akan Standar Akuntansi Pemerintahan sangatlah penting dalam pembuatan laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif yang sesuai dengan PP 71/2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sementara ini, pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang memahami dan menguasai ilmu akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, unsur pemahaman standar akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan transaksi keuangan. Sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu sistem pengelompokan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu

informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya akan mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa Opini. Pada saat Badan Pemeriksa Keuangan memberikan suatu Opini atas sebuah Laporan Keuangan maka itu dapat memberikan gambaran berkualitas atau tidaknya sebuah instansi, dimana dapat dilihat dari sebuah pengelolaan keuangan daerah yang tersistem dengan baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat menarik dikaji lebih jauh, dikarenakan dalam kenyataannya laporan keuangan pemerintah daerah masih terdapat data-data yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Kemudian masih terdapat Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang mengarah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dikarenakan dalam penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah ditetapkan serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya dapat meningkatkan efektifitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya. Namun, sejauh ini Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen telah melaksanakan dengan sebaik mungkin walaupun dalam realitanya belum dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik. Permasalahan yang akan diteliti mencakup: (1) bagaimana pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. (2) bagaimana pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

Tujuan khusus dalam penelitian ini sejauh mana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah memahami standar akuntansi pemerintah serta sejauh mana implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang nantinya akan

berdampak kepada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

LANDASAN TEORI

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Hanafi (2017:52) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan daerah, mencakup :

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia. Merupakan karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.
- b. Peran Audit Internal. Merupakan kegiatan penilaian yang independen dalam organisasi untuk mereview operasi sebagai jasa yang diberika kepada manajemen. Internal audit merupakan auditor yang bekerja didalam suatu entitas atau perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan diterapkan oleh manajemen yang telah dipatuhi, menentukan tingkat efektivitas dan efesensi serta prosedur aktivitas kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang telah dihasilkan oelh bagian-bagian dari entitas atau organisasi.
- c. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Merupakan sistem informasi yang mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah.
- d. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah. Merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD). Selain itu merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang disusun dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Karakteristik kualitatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas seperti yang diharapkan menurut PP 71/2010 antara lain :

1. Relevan.
Dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud pengguna.
2. Andal.
Dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial menyesatkan.
3. Dapat Dibandingkan.
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain.
4. Dapat Dipahami.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Nuraini (2007) pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk

mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Oleh karena itu, pemahaman standar akuntansi pemerintah merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemahaman standar akuntansi pemerintah diukur dengan indikator berikut :

- a. Memahami neraca
- b. Memahami laporan realisasi anggaran
- c. Memahami laporan arus kas
- d. Memahami catatan atas laporan keuangan
- e. Memahami persediaan
- f. Memahami investasi
- g. Memahami aset tetap
- h. Memahami konstruksi dalam pekerjaan
- i. Memahami kewajiban
- j. Memahami koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa

Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 23 ayat 1 menerangkan sebagai berikut : “serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Indikator pemanfaatan sistem pengelolaan informasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada penelitian Rashwan (2017), mencakup :

- a. Sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
- b. Jaringan internet yang termanfaatkan dengan baik
- c. Aplikasi atau software yang digunakan
- d. Laporan keuangan yang terkomputerisasi
- e. Aplikasi atau software sesuai dengan undang-undang yang berlaku

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif tersebut digunakan untuk

menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bireuen. Menurut Sugiyono (2003: 11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Menurut Sugiyono, (2003:14) Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2010:139). Daftar pertanyaan dan pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bireuen.

Populasi dalam penelitian ini adalah para pejabat yang terlibat dalam proses keuangan, pelaporan dan anggaran yaitu Kasubbag Keuangan dan Staf Keuangan yang meliputi SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bireuen yang berjumlah 31 SKPD. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *Non Probability Sampling* dengan jenis sampling jenuh atau sensus. Menurut Kuncoro (2007:164), sampling jenuh atau sensus adalah sebuah teknik pengambilan sampel dimana semua populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan karena populasi relatif kecil. Pengambilan sampel dengan metode ini memungkinkan penulis untuk melakukan perhitungan statistik untuk menentukan hubungan kedua variable yang akan diteliti. Adapun sampel pada penelitian ini adalah para pejabat yang terlibat dalam proses keuangan, pelaporan dan anggaran yaitu Kasubbag Keuangan dan Staf Keuangan yang meliputi SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bireuen yang berjumlah 62 orang sampel.

Persamaan regresi linier beganda pada penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
- a = Konstanta
- X₁ = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan
- X₂ = Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- b₁ b₂= Koefisien regresi
- e = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan penelitian dilihat dari data yang diperoleh pada objek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Bireuen. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber serta jawaban dari kuisisioner yang telah didistribusikan sebelumnya. Data hasil penelitian ini diperoleh dari 62 orang pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi 31 SKPD atau

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Ukur
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Laporan Keuangan Daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami PP No. 71 Tahun 2010	Likert
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sumber: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Dapat memahami dengan baik mengenai: 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan 5. Persediaan 6. Investasi 7. Aset Tetap 8. Kontribusi 9. Kewajiban 10. Koreksi Kesalahan	Likert
Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X ₂)	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksana APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. Sumber: Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 (Pasal 23: ayat 1)	1. Sistem Akuntansi yang sesuai dengan SAP 2. Jaringan internet 3. Jaringan internet dimanfaatkan dengan baik 4. Aplikasi yang digunakan 5. Laporan keuangan terkomputerisasi 6. Software sesuai dengan UU	Likert

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen sebagai lokasi penelitian.

Tabel 1. Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Vali 1. Laki-laki	40	64,5	64,5	64,5
2. Wanita	22	35,5	35,5	100,0
Total	62	100,0	100,0	

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki yang berjumlah sebanyak 40 orang atau sebesar 64,5% dan yang perempuan adalah sebanyak 22 orang atau sebesar 35,5%.

Tabel 2. Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 25 – 35	1	1,6	1,6	1,6
36-45	16	25,8	25,8	27,4
> 45	45	72,6	72,6	100,0
Total	62	100,0	100,0	

Pada Tabel 2 dapat dilihat dan dijelaskan bahwa usia yang di miliki responden yang paling dominan adalah > 45 tahun sebanyak 45 orang atau sebesar 72,6%, selanjutnya responden dengan usia antara 36-45 tahun sebanyak 16 orang atau sebesar 25,8% dan terakhir responden dengan usia antara 25-35 tahun hanya sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 1,6%.

Tabel 3. Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Val Sarjana	46	74,2	74,2	74,2
id Diploma	4	6,5	6,5	80,6
SMU	12	19,4	19,4	100,0
Total	62	100,0	100,0	

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan

Sarjana dengan jumlah 46 orang atau sebesar 74,2%. Seterusnya dilanjutkan dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 4 orang atau sebesar 6,5%. Selanjutnya tingkat pendidikan SMU sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 19,4%.

Tabel 4. Masa Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Vali 1, < 5	5	8,1	8,1	8,1
d 2,6 – 10	24	38,7	38,7	46,8
3,> 11	33	53,2	53,2	100,0
Total	62	100,0	100,0	

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 11 tahun yaitu sebanyak 33 orang. Kemudian responden dengan masa kerja antara 6 – 10 tahun sebanyak 24 orang atau sebesar 38,7% dan terakhir responden dengan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 8,1 persen

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 5. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviation	N
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	39,9839	7,52372	62
Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₂)	24,8548	3,50572	62
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	15,6452	2,72870	62

Berdasarkan Tabel 5 Statistik Deskriptif yang ditunjukkan adalah rata-rata (mean) dan deviasi standar serta N yang merupakan banyaknya kasus yang diolah. Rata-rata (*Mean*) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data. Deviasi standar merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya.

Dalam Tabel 5 tampak *Mean* atau rata-rata variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah adalah 39,98 dan standar deviasinya adalah 7,52. Kemudian kita lihat *Mean* variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah 24,85 dan standar deviasinya adalah 3,50. Selanjutnya mean variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen yaitu 15,64 dan standar deviasinya adalah 2,72.

Uji Validitas

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	r-hitung Pearson Correlation	Signifikan (2-tailed)	r-tabel	Keterangan
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	X _{1.1}	0,738	0,000	0.250	Valid
	X _{1.2}	0,817	0,000	0.250	Valid
	X _{1.3}	0,800	0,000	0.250	Valid
	X _{1.4}	0,750	0,000	0.250	Valid
	X _{1.5}	0,822	0,000	0.250	Valid
	X _{1.6}	0,766	0,000	0.250	Valid
	X _{1.7}	0,804	0,000	0.250	Valid
	X _{1.8}	0,739	0,000	0.250	Valid
	X _{1.9}	0,828	0,000	0.250	Valid
	X _{1.10}	0,726	0,000	0.250	Valid
Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₂)	X _{2.1}	0,805	0,000	0.250	Valid
	X _{2.2}	0,752	0,000	0.250	Valid
	X _{2.3}	0,659	0,000	0.250	Valid
	X _{2.4}	0,596	0,000	0.250	Valid
	X _{2.5}	0,700	0,000	0.250	Valid
	X _{2.6}	0,713	0,000	0.250	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Y-1	0,810	0,000	0.250	Valid
	Y-2	0,776	0,000	0.250	Valid
	Y-3	0,742	0,000	0.250	Valid
	Y-4	0,809	0,000	0.250	Valid

Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa semua instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah valid karena memiliki nilai koefisien korelasi (r-hitung) > 0,250 berdasarkan nilai t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05.

Tabel 7. Rekapitulasi Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

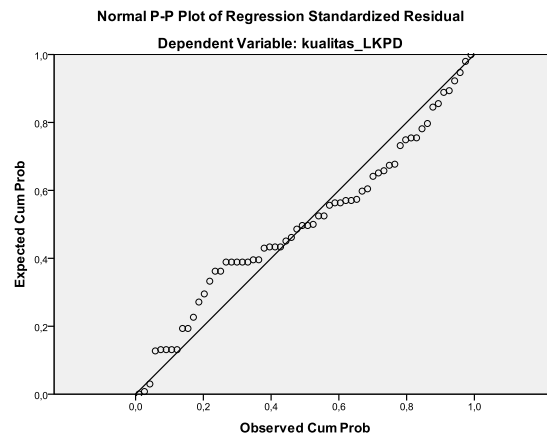
No	Variabel	Cronbach's Alpha	Skala Alpha	Ket.
1	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	0,928	0,60	Reliabel
2	Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₂)	0,798	0,60	Reliabel
3	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	0,790	0,60	Reliabel

Dari Tabel 7 diatas terlihat bahwa instrumen penelitian untuk seluruh variabel penelitian (Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah) adalah reliabel, karena nilai *Alpha Cronbach* lebih besar atau sama dengan 0,60.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal.

Gambar 1. Normal Probability Plot



Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa titik-titik pada *normal probability plot*

menyimpang dan mengikuti garis diagonal, maka disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana di antara variabel bebas dalam model regresi terdapat korelasi yang signifikan. Model regresi yang baik tidak mengandung multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	0,379	2,638
Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₂)	0,379	2,638

Sumber: Lampiran output SPSS (Data Diolah, 2018)

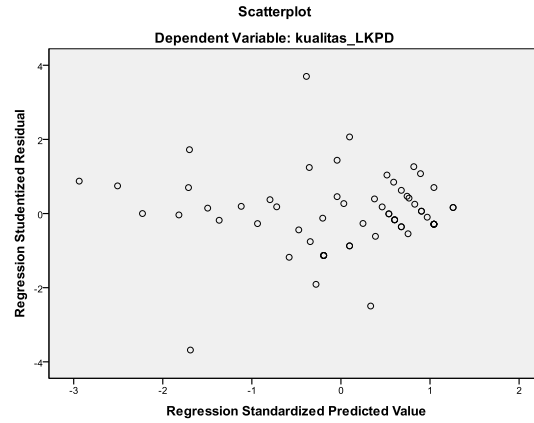
Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari 2 variabel bebas semuanya lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas atau asumsi non multikolinieritas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan adanya ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat signifikansi alpha koefisien korelasi > 0,05 atau dengan metode *scatter plot*. Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat adanya pola tertentu seperti bergelombang, menyempit kemudian melebar. Dengan demikian,

agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.

Gambar 2 . Scatter Plot ZPRED Dan SRESID



Gambar 2 *Scatter Plot* di atas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi yang digunakan, dengan demikian asumsi non heterokedastisitas terpenuhi.

Rancangan Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda, penggunaan teknik ini dilakukan jika terdapat dua atau lebih variabel terikat. Menurut Sugiyono (2009) regresi linier berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruhnya variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut ini adalah hasil analisis regresi linier berganda antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) menggunakan program SPSS, dengan persamaan regresi:

$$Y = a + bx_1 + bx_2$$

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	t-tabel	Sig uji t
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	0,191	6,709	1,671	0,000
Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₂)	0,355	5,805		0,000
Konstansta = 0,799				
R square = 0,862				
Adjusted R Square = 0,858				
F hitung = 184,775				
Signifikansi F = 0,000 ^a				

Berdasarkan hasil olah SPSS maka, model regresi linier berganda yang dihasilkan adalah :

$$Y = 0,799 + 0,191 (X_1) + 0,355 (X_2)$$

Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda pada hasil output SPSS di atas diuraikan sebagai berikut :

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta (α) adalah sebesar 0,799 artinya apabila variabel bebas Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) bernilai nol, maka diprediksikan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) adalah sebesar 0,799

b. Koefisien Regresi (βi)

- 1) Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) adalah sebesar 0,191 artinya jika Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) naik satu point, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen akan mengalami kenaikan sebesar

0,191. Tanda positif menunjukkan searah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Artinya bahwa jika ada peningkatan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah maka akan terjadi kenaikan Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar nilai koefisien regresi yaitu 1,91 %.

- 2) Nilai koefisien regresi variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) adalah sebesar 0,355 artinya jika variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) naik satu point, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen akan mengalami peningkatan sebesar 3,55 %.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil uji kelayakan model dengan *F-test* menunjukkan bahwa nilai F-hitung 184,775 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berada di atas taraf nyata (α) = 0,05 (5%), ini berarti bahwa model yang digunakan pada penelitian ini *fit* (layak).

Hasil uji F ini memberikan makna bahwa variabel-variabel independen yang diidentifikasi pada penelitian ini mampu memprediksi dan menjelaskan fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen atau ada pengaruh secara simultan.

2. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh secara sendiri-sendiri dari masing-masing variabel bebas (independen) pada variabel terikat yang juga dikenal dengan pengujian secara parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi, jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan di bawah 0.05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikansi hasil t_{hitung} lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ditolak. Output analisis regresi berganda atas variabel-variabel yang diteliti disajikan pada lampiran.

Untuk kemudahan mekanisme penyajian informasi dan pembahasan beberapa informasi

terpilih untuk kebutuhan pengujian secara parsial *t-test* dapat disajikan pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	t - hitung	t - table	Sig
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	0,191	6,709	1,671	0,000
Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	0,355	5,805	1,671	0,000

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai t hitung untuk variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) pada 6,709 > dari t-tabel 1,671, maka Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. selanjutnya angka signifikansi sebesar 0.000 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan pada 0.05, maka terbukti bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan hipotesis pertama.
2. Nilai t hitung untuk variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) pada 5,805 > t-tabel 1,671 dan angka signifikansi sebesar 0.000 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan pada 0.05 maka terbukti bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan hipotesa kedua.

3. Uji Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi pearson adalah untuk mengetahui adanya derajat/kekuatan hubungan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

Nilai probabilitasnya adalah 0,05; hal ini disebabkan uji dilakukan satu sisi. Output dari program Statistik 22 diperoleh nilai koefisien korelasi seperti yang tertera pada tabel 10 berikut:

Tabel 10. Koefisien Korelasi Correlations

		kualitas_LKPD	pemahaman_sap	pemanfaatan_SI PKD
Pearson Correlation	kualitas_LKPD	1,000	,885	,870
	pemahaman_sap	,885	1,000	,788
	pemanfaatan_SIP KD	,870	,788	1,000
Sig. (1-tailed)	kualitas_LKPD	.	,000	,000
	pemahaman_sap	,000	.	,000
	pemanfaatan_SIP KD	,000	,000	.
N	kualitas_LKPD	62	62	62
	pemahaman_sap	62	62	62
	pemanfaatan_SIP KD	62	62	62

Berdasarkan analisis diatas, maka didapatkan serangkaian angka probabilitas, terlihat kedua variabel data sama-sama berkorelasi secara signifikan, yaitu antara Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dengan nilai probabilitas yaitu sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap Kualitas LKPD.

Begitu juga dengan nilai korelasi antara Kualitas LKPD dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai probabilitas yaitu sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil dari 0.000. hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

4. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap

variabel terikatnya. Output dari program IBM SPSS Statistik 22 diperoleh nilai koefisien korelasi seperti yang tertera pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 11. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durb in-Watson
1	,929 ^a	,862	,858	1,02948	1,677

Sumber: Data Diolah (2018)

Berdasarkan korelasi pearson dengan menggunakan rumus determinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= (r^2) \times 100\% \\
 &= (0,862)^2 \times 100\% \\
 &= 0,858 \\
 &= 85,8\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus di atas maka hasil perhitungan dapat dikategorikan dalam kriteria besarnya pengaruh berdasarkan tabel yang dikemukakan oleh Sugiyono, 2006:119 yaitu sebagai berikut:

Tabel 12. Kriteria Koefisien Determinasi

Interval	Tingkat Pengaruh
0% - 19,9%	Sangat rendah
20% - 39,9%	Rendah
40% - 59,9%	Sedang
60% - 79,9%	Kuat
80% - 100%	Sangat kuat

Dari hasil di atas maka Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk kategori sedang dengan nilai 0,858 (85,8%) memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen sedangkan sisanya sebesar 100% - 85,8% = 14,2 % disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis regresi maka pada bagian ini akan dibahas hasil perhitungan yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Pengujian ditunjukkan melalui hipotesis yang ada sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh masing-masing konstruk terhadap konstruk yang lainnya.

1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Bireuen diketahui bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh dan hubungan sebab akibat yang searah terhadap kualitas LKPD, maksudnya ialah setiap nilai Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah naik maka dapat meningkatkan kualitas LKPD. Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah diketahui sebesar 0,191 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini membuktikan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Dari hasil penelitian ini, juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Diah Lestari (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada 15 Dinas Kabupaten Badung).

Penelitian ini dalam pengujian parsial pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap kualitas laporan keuangan 26,9%, pengaruh pendidikan terhadap kualitas laporan

keuangan 43,9% dan pengaruh pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan 56,3%. Secara simultan dihasilkan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendidikan dan pelatihan secara signifikan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 63,1%. sudah menggunakan SAP sebagai acuan untuk menyajikan laporan keuangan.

2. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dengan koefisien regresi sebesar 0,355 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Ini berarti bahwa meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan sebaliknya, menurunnya Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah maka akan menurunkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Sari Maeka (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Jembrana).

Dari hasil analisis koefisien korelasi (R) sebesar 0,854 menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara X1 dan X2 kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Hasil R² sebesar 0,730. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara variabel independen (pemahaman SAP dan pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah), yakni sebesar 73%.

Sedangkan sisanya sebesar 27% dipengaruhi oleh variabel lain

3. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil uji serentak menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas LKPD, dengan koefisien determinasi sebesar 0,858 yang berarti bahwa 85,8% variasi pada variabel Kualitas LKPD mampu diterangkan oleh kedua variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara bersama-sama.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis persamaan koefisien regresi yang diperoleh yaitu $Y = 0,799 + 0,191 (X_1) + 0,355 (X_2)$ dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh lebih besar terhadap Kualitas LKPD Pemerintahan Kabupaten Bireuen apabila di bandingkan dengan variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas LKPD.

Bila kita perhatikan dari hasil penelitian terdahulu sebagaimana yang dilakukan oleh Yuliani, Nadirsyah dan Usman Bakar (2010) yang meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel independen yang diturunkan secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R² sebesar 0,281 lebih besar dari nilai 0. Pengaruh sebesar 28,1% menunjukkan bahwa

pengaruhnya lemah karena nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,281$ lebih kecil dari 0,5. Diduga masih ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Marina Ika Puspita (2009) yang meneliti mengenai Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Instansi Pemerintah Daerah di Bali. Hasil penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara bersama-sama terhadap Kualitas LKPD, hal ini berdasarkan nilai F hitung ($23,853$) $>$ F tabel ($3,99$). Hal ini berarti penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sejalan.

KESIMPULAN

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. (2016). Analisis Laporan. Keuangan Edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Putu Diah Lestari. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap), Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Penyajian Laporan Keuangan (Studi Pada 15 Dinas Kabupaten Badung). e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 No. 1 Tahun 2014.
- Rashwan. (2017). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Bone). Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sari, Ni Putu Yogi Merta Maeka, I Made Pradana Adiputra dan Edy Sujana. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2010). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Yuliani Safrida, Nadirsyah dan Usman. B. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3. No. 2. Juli 2010.